

**URGENSI STANDARDISASI PERBURUHAN DALAM  
KERANGKA KERJA SAMA AFTA DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RAHMANIA**  
99 140 120

**Program Kekhususan**

**Hukum tentang Hubungan Transnasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**No. Reg : 1775/PK V/IX/2004**

**URGENSI STANDARDISASI PERBURUHAN DALAM  
KERANGKA KERJA SAMA AFTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**  
(Rahmania, 99140120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 hal, 2004)

**ABSTRAK**

Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003 yang mengarah kepada liberalisasi pasar ini bukan hanya berpengaruh terhadap perdagangan barang negara-negara anggotanya saja, namun juga terhadap pergerakan investasi, jasa dan juga masalah perburuhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggunaan upah buruh yang rendah serta pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang lunak sebagai keunggulan komparatif untuk menarik masuknya investor asing. Keadaan tersebut menyebabkan persaingan untuk menarik minat investor asing antar sesama negara anggota ASEAN akan semakin terbuka luas dan hal ini memungkinkan terjadinya relokasi perusahaan diantara sesama negara anggota ASEAN tak dapat dihindari yang semuanya adalah demi mencapai efisiensi dan keuntungan yang lebih besar.

Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan kaitannya dengan AFTA, sejauh mana urgensi sebuah standar perburuhan dalam kerangka kerja sama AFTA dan apa implikasi dari standarisasi perburuhan dalam kerangka kerja sama AFTA bagi hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersumber pada data sekunder maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berasal dari deklarasi, perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, surat kabar, maupun situs internet. Bahan hukum tertier juga digunakan, seperti kamus dan bibliografi.

Dari hasil penelitian maka disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia belum cukup memberikan kepastian hukum menjamin ketenangan berusaha. Selain itu dalam upaya menuju liberalisasi pasar kerja ASEAN sebagai realisasi dari AFTA ini, diperlukan sebuah standar yang mengatur masalah perburuhan disebabkan bervariasinya tingkat pertumbuhan dan pendapatan dari negara-negara anggota AFTA yang menyebabkan bervariasinya pula tingkat pekerja serta agar persaingan untuk menarik investor asing untuk menanamkan modal ini tidak menimbulkan konflik yang akan mengganggu stabilitas kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu segera dilakukan upaya peningkatan kualitas pekerja Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota AFTA lainnya.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan politik dan ekonomi internasional yang bergerak sangat cepat menuntut negara-negara di dunia untuk dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat bagi negaranya agar dapat bersaing di dunia internasional. Setiap negara akan semakin menyadari bahwa eksistensinya dalam pergaulan internasional akan ditentukan oleh kestabilan ekonomi negaranya. Pembangunan dunia ini akan lebih berhasil apabila dilaksanakan melalui peningkatan perdagangan internasional dengan sistem yang lebih adil dan terbuka sesuai dengan arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Di lihat dari sudut ekonomi dan politik, globalisasi merupakan proses perubahan organisasi dari fungsi kapitalisme yang ditandai dengan munculnya integrasi pasar dan perusahaan-perusahaan transnasional dan tertinggalnya institusi supranasional.<sup>1</sup> Seiring dengan berlangsungnya proses globalisasi ekonomi, kerja sama regional dalam bidang ekonomi dan perdagangan semakin berkembang dan dikembangkan. Hal ini dapat terlihat dengan direalisasinya Pasar Tunggal Eropa, berdirinya *North America Free Trade Area* (NAFTA), dan semakin maraknya usaha untuk menciptakan kerja sama di kawasan Asia Pasifik melalui APEC.

---

<sup>1</sup> Aloysius Uwiyono, "Implikasi Hukum Pasar Bebas dalam Kerangka AFTA terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, 22:41, Januari, 2003.

Kerja sama ekonomi regional ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan menciptakan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. Sehingga setiap negara anggota harus berusaha untuk meningkatkan kualitas produksinya agar dapat bersaing dengan produksi dari negara anggota lainnya.

Selain itu, kerjasama ekonomi regional juga bertujuan sebagai langkah persiapan dalam menuju suatu globalisasi ekonomi yang lebih luas dan kompetitif yang selama beberapa dekade terakhir menjadi trend dunia dengan nama kawasan bebas perdagangan atau yang lebih populer dalam bahasa Inggris "*Free Trade Area*" (FTA).

Secara sederhana, FTA dapat diartikan sebagai upaya dua atau lebih negara untuk menghapuskan berbagai hambatan di bidang perdagangan barang maupun jasa yang sebelumnya berlaku di antara mereka.<sup>2</sup>

*Association of South East Asian Nations* ( selanjutnya di singkat dengan "ASEAN" ) sebagai organisasi regional yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya seolah tidak mau tertinggal dengan trend dunia ini. ASEAN telah sejak lama mengupayakan terbentuknya FTA di kawasan Asia Tenggara ini.

Dimulai dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali pada tahun 1977 dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian yang diberi nama *The Agreement on ASEAN on Preferential Trading Arrangement*. Inti dari perjanjian tersebut adalah suatu negara ASEAN akan memberikan perlakuan khusus

---

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwana, "AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional," *Jurnal Hukum Bisnis*, 22: 5, Januari, 2003.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep pembentukan AFTA yang mengarah kepada liberalisasi pasar telah memberikan pengaruh bagi negara-negara anggotanya, bukan hanya dalam bidang perdagangan barang namun juga terhadap pergerakan investasi, jasa, dan juga ketenagakerjaan yang bersifat lintas batas negara.
2. Liberalisasi pasar kerja ASEAN yang merupakan realisasi kerangka kerja sama di sektor jasa dalam AFTA tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada sebuah standar yang mengatur masalah perburuhan berupa standar kompetensi diantara sesama negara anggotanya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal kondisi pekerja dan kualitas sumber daya manusia serta standar keahlian di masing-masing negara anggota.
3. Perdagangan bebas mengakibatkan semakin besarnya persaingan dari negara-negara berkembang untuk menarik minat investor asing menanamkan modal terutama di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan terjadinya mobilitas modal dari satu negara ke negara lainnya dapat terjadi dengan sangat cepat dan mudah sehingga relokasi perusahaan dari satu negara ke negara lainnya tidak dapat dihindari oleh karena investor selalu mencari negara yang paling dapat memberikan keuntungan lebih besar. Relokasi ini

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku :

Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Leisink, Peter, *Globalisation and Labour Relations*, Cletenham, United Kingdom:Edward Elgar Publishing Limited, 1999.

Nasution, M. Arif, ed *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.

Syah, Djalinus, *Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya*, PT Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 1985.

### B. Makalah – Jurnal :

Compa, Lance, *Labour Rights and Labour Standards in International Trade*,  
Kliping Kasus-kasus Hukum Ketenagakerjaan Internasional Aloysious  
Uwiyono.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS